

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Andi Hamzah , 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amirrudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Matarram.

Rajawali Pers

-----, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. : Jakarta

Aziz Syamsudin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika)

-----, 2014 “Tindak Pidana Khusus” Jakarta. Sinar Grafika

Bima Priya Santoso, dkk. 2010. *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina

Public Policy Institute, NLRP, Jakarta

Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen*, GENTA Press, Jogjakarta

Jur Hamdi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*

*Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Mahfud MD, 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Wali Pers)

M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja

Grafindo Persada

Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2015.

“Laporan Penelitian (Merancang Model Seleksi Pimpinan Lembaga Negara)”, (Padang, TAHIR FOUNDATION)

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen “Dinamika*

*Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi”*, (jakarta: Raja Grafindo Persada)

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim  
Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK).

## C. Makalah

Donal Fariz, *Mendesain Ulang Model Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan  
Korupsi*, dalam Konferensi Hukum Tata Negara II, tanggal 11-12  
September 2015 di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat.

Sartika Intaning Pradhani “Studi Komparatif Seleksi Anggota Komisi Negara  
Independen yang Terdapat dalam Konstitusi antara Panitia/Tim  
Seleksi di Indonesia dan *the Commission on Appointment* di Filipina”  
dalam Seminar Nasional Konferensi Hukum Tata Negara KE-2 yang

diadakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 11-12 September 2015.

#### D. Website

<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> (diakses tanggal 26 Mei 2016 pukul 09:56 wib).

[http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298043-HUPE-35-3-\(Jul-Sep\)2005-275.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298043-HUPE-35-3-(Jul-Sep)2005-275.pdf) diakses tanggal 01/06/2016 pukul 13:26 WIB.

<http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 7 juni 2016 pukul 10:45 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Independen> (di akses tanggal 03 September 2016, pukul 12:05 wib).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54db4fff7d855/ini-lima-jurus-kpk-hong-kong-sukses-berantas-korupsi> (diaksestanggal 19 Desember 2016, pukul 11:16 Wib).

#### E. Seminar

Seminar Nasional dengan topik “*Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum*” dalam Konferensi Hukum Tata Negara Kedua yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas di Hotel Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/9). Hadir sebagai narasumber tiga pakar hukum kondang yakni Saldi Isra, Denny Indrayana, dan Todung Mulya Lubis.

#### F. Sumber Lain

Lihat laporan CMI (CHR Michelsen Institute)report atau laporan dari CMI, 2000, *Fungsi akuntabilitas lembaga audit tertinggi di Malawi, Uganda dan Tanzania.*

Penelitian Gunawan A. Tauda.*Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.*( Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011).

Hasilwawancaradengan I GedePasekSuwardikesalah satu anggota DPD Bali dalam seminar yang diangkat oleh FI2MI (Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa)padafebruari 2016.

PenelitianAnnisa Perdany dan Sri Suranta, *Pengaruh dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit Investigatif pada Kantor Perwakilan BPK-RI Yogyakarta* (Yogyakarta: 2012).

Lihat Symposium On The Independence Of Supreme Audit Institution “*Report On The 17<sup>th</sup> UN/INTOSAI Seminar On Government Auditing*” (Vienna19 - 23 April 2004).

Making SAI (Supreme Audit Institution) independence a reality “*Some Lessons From across the Commonwealth*” Commonwealth Auditor General, India, March 2015.

Penelitian Ninuk Wijiningsih dan Wiratno, *Peran dan Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Dalam Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggungjawab Keunagan Negara* ( Jakarta: 2004, Universitas Trisakti).

Budgetunit5 “*Parliament and the audit of public accounts*” Source: INTOSAI (1998), Pdf. [http://www.intosai.org/2\\_LIMADe.html](http://www.intosai.org/2_LIMADe.html)(Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts).

Characteristics Of Different External Audit Systems “*departement for international development*” Pdf, (©Clmmrown copyright 2004).

Sita Planasari Aquadini. 2016. “Komisi Anti-Rasuah di Simpang Jalan (Pemerintah Hong Kong berpotensi memamatkan independensi KPK)” *KOMPAS*, 16 Desember 2016.

<http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/komisi-pemberantasan-korupsi-hongkong.html>.

